

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi

Amanda Yecci Noeng¹, Lilis Ardini^{2*}, Kurnia³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

¹Yeccinoeng07@gmail.com, ²lilisardini@stiesia.ac.id, ³kurnia@stiesia.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 6 Juni 2023

Disetujui : 13 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

This study aimed to examine some factors which influence the local financial performance, with capital expenditure as the moderating variable, in East Nusa Tenggara from 2016-up to 2020. The data in this study used the Budget Realization Report of Local Government in East Nusa Tenggara. Furthermore, the research was quantitative. The data analysis technique applied multiple linear regression; and Moderated Regression Analysis for testing moderating variables. As a result, the fiscal balance had a significant positive effect on local financial performance. However, both local-owned source revenue and economic growth had an insignificant effect on local financial performance. The capital expenditure strengthened the effect of local owned-source revenue on local financial performance, but it did not strengthen the fiscal balance as well as the economic growth. The study also revealed that the Local Government of East Nusa Tenggara applied supervision or control toward the assignments for their subordinates, in order to finish on time. Besides, they gave appreciation to the ones who succeed in doing the task given.

Keywords: *Balance, Capital Expenditure, Economic: Local-Owned Source Revenue, Fiscal Growth, Local Financial Performance*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2016:17).

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Provinsi Di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 Kabupaten/Kota. Provinsi ini berada di Sunda Kecil. 24 Sejak tahun 2001, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diberikan otonomi seperti provinsi lainnya, memberdayakan daerah untuk menjalankan anggarannya sendiri. Ukuran kinerja suatu daerah adalah pendapatan daerahnya sendiri. Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur

untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi sumber daya lokalnya. Sumber daya lokal yang ada dapat dimaksimalkan melalui konsolidasi dan ekspansi. Pemberdayaan merupakan inisiatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sumber pendapatan yang ada, sedangkan pemekaran adalah memperluas basis sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Timur. meningkatkan. Provinsi Nusa Tenggara. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di daerah otonom.

Terdapat penelitian yang dilakukan Wahyudin & Hastuti, (2020) dengan judul “pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transfer Neraca Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Serentak Asli Pendapatan, Transfer Neraca Fiskal dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di daerah otonom. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), Provinsi NTT memiliki tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dan menempati peringkat di atas Papua dan Papua Barat secara nasional

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan asli, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para pengembang ilmu ekonomi pada umumnya dan akuntansi pada khususnya dan Grand Theory yang digunakan adalah stewardship theory, dimana teori ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi steward dalam pengambilan keputusan manajemen dimasa yang akan datang. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu efektivitas perusahaan dan mendorong aplikasi untuk memberikan masukan pemikiran tentang sistem. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya agar tingkat anggaran dan pendapatan asli daerah didistribusikan secara optimal. Berdasarkan teori, fenomena, dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, maka peneliti: **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi ”**.

STUDI LITERATUR

Stewardship Theory

Menurut Donaldson dan Davis (Rizal dan Hermanto, 2019) Teori stewardship adalah suatu keadaan dimana para manajemen tujuan utamanya bukan untuk tujuan pribadi tetapi untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan penambahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah mendorong peningkatan pendapatan bagi penduduk daerah, serta peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan masing – masing daerah (Florida, 2016).

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan ukuran pengelolaan keuangan organisasi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kinerja adalah output atau hasil kegiatan atau program, yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran tingkat pencapaian pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25)

Menurut Sari et al., (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian suatu pekerjaan di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama suatu periode anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi (economic development) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan dibidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah proses kenaikan output (produksi) dalam jangka panjang (Arsyad, 2016 : 51).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD digunakan untuk membiayai kegiatan daerah atau mengadakan pembangunan daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja keuangan daerah. Membaiknya kinerja keuangan daerah mencerminkan kemajuan di daerah. Semakin besar peningkatan PAD maka semakin tinggi pula kinerja keuangan suatu daerah. Sebaliknya semakin kecil PAD maka semakin rendah kinerja keuangan daerah tersebut.

Hal ini didukung oleh penelitian Rakhmini, (2017), Muda, (2017), dan Heryanti et al., (2019) yang menyatakan pendapatan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang mengarah, maka penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian ini yaitu:

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Komponen kedua adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Pemerintah pusat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan di daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil dana perimbangan yang diterima daerah, maka semakin rendah pula kinerja keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Afia, et al., (2021), dan Florida, (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang mengarah, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Komponen ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara yang

menggambarkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan sebagai syarat mutlak bagi proses pembangunan. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan suatu daerah. Sebaliknya, semakin kecil pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah pula kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin & Hastuti, (2020), and Muda, (2017), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang mengarah, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Komponen keempat adalah belanja modal. Belanja modal merupakan salah satu sarana untuk mendukung pelayanan publik. Dengan belanja modal yang sesuai, Pemerintah akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan negara, yang tercermin dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Besarnya belanja modal tercermin dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan bahwa belanja modal berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Heryanti et al., (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang mengarah, maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimoderasi oleh Belanja Daerah

Komponen kelima adalah Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimoderasi Belanja Daerah. Belanja modal merupakan salah satu sarana untuk mendukung pelayanan publik. Dengan belanja modal yang tepat, pemerintah daerah dapat menyediakan sarana, prasarana, dan infrastruktur publik yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah memerlukan beberapa dana yang bersumber dari pendapatan daerah, salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah. Pemanfaatan pendapatan daerah khususnya pendapatan daerah yang tepat guna yaitu untuk belanja modal yang langsung dapat menyentuh pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka kemandirian daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Afia et al., (2021), yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menempatkan Belanja Modal sebagai moderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang telah diuraikan diatas, maka H5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Belanja modal memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimoderasi oleh Belanja Modal

Komponen keenam adalah Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi oleh Belanja Modal. Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal horizontal, yaitu kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Tentang daerah yang memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi atau rendah, serta kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga

pencapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah, hal ini didukung oleh Abdullah, (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menempatkan Belanja Modal sebagai modulator dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah, peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang telah diuraikan diatas, maka H6 yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H6: Belanja modal memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimodifikasi oleh Belanja Modal

Komponen ketujuh adalah Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimodifikasi oleh Belanja Modal. Belanja modal dapat memperkuat atau memperlemah pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal harus dialokasikan dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana yang akan berdampak pada kinerja keuangan daerah, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al., (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. dengan memperkuat belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menempatkan Belanja Modal sebagai moderasi pertumbuhan kinerja keuangan daerah, peneliti mencoba mengujinya berdasarkan asumsi yang telah diuraikan diatas, maka H7 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H7: Belanja modal memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah

METODE

Jenis penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, (2018 : 80) yaitu metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sumber data yang diambil dari BPK/E-PPID Pusat yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 - 2020. Metode pengumpulan data secara dokumenter. berupa data penting dari BPK/E-PPID Pusat terkait Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 - 2020. Sampel yang digunakan adalah jenuh. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah sama dengan populasi yaitu 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan moderasi.

Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa rasio-rasio tersebut menggunakan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel bebas penelitian. Rumus rasio keuangan yang dapat digunakan untuk kinerja keuangan daerah menurut Mahmudi, (2016 : 140-142) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

Pendapatan daerah adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi daerah. Rumus perhitungannya adalah:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah + Lainnya – Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah

Dana perimbangan adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Rumus perhitungannya adalah:

Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, serta perubahan persediaan, ekspor, dan impor. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah:

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode. Rumus perhitungan belanja modal menurut Puspitasari, (2015) adalah sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Aset Tetap Lainnya

HASIL

Pengujian normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan nilai Asymp. sig. (2-tailed) dari penelitian ini tabel lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,1 sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Selain itu, titik-titik tersebar ke atas dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y yang berarti tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Dari hasil uji autokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,835 dan nilai dL = 1,4404, serta nilai Du = 1,8822. Karena nilai d=1.835 lebih besar dari limit du=1.8822 dan lebih kecil dari (4-du)=2.1178 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Pengujian Model I

Tabel I Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	108.259	61.487
PAD	4.671	1.448
DP	.829	2.402
PED	16.298	29.915
BM	15.348	30.815

Sumber : data sekunder yang sudah diolah

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Y = 108.259 + 4.671(PAD) + 0.829(DP) + 16.298(PED) + 15.348(BM) + e$$

Tabel 2 Hasil Uji Statistik F Model 1

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	800.512	3	266.837	3.774	.013 ^b
Residual	7494.058	106	70.699		
Total	8294.571	109			

a. Dependent Variable: REP
 b. Predictors: (Constant), REG, EF, LR,CE

Sumber : data sekunder yang sudah diolah

Table 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R2 Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.311 ^a	.097	.071	8.408250	1.407

a. Predictors: (Constant), PED, DP, PAD,BM
 b. Dependent Variable: REP

Sumber : data sekunder yang sudah diolah

Tabel 4 Hasil uji t model 1

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1.761	.000
	PAD	-3.225	.000
	DP	.345	.000
	PED	.545	.587
	BM	.645	.043

Sumber : data sekunder yang diolah

Pengujian Model 2

Tabel 5 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-.022	.049		-.442	.660
PAD	.939	.056	.939	16.903	.000
DP	.177	.056	.177	3.175	.002
PED	-.030	.049	-.030	-.609	.544
BM	.097	.052	.097	1.881	.063
PAD*BM	.039	.060	.039	.644	.052
DP*BM	.075	.050	.089	1.500	.037
PED*BM	.014	.051	.014	.276	.783

Sumber: data sekunder yang diolah

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa model regresi

$$Y = -0.022 + 0.939(\text{PAD}) + 0.177(\text{DP}) - 0.030(\text{PED}) + 0.097(\text{BM}) + 0.039(\text{PAD*BM}) + 0.075(\text{DP*BM}) + 0.014(\text{PED*BM}) + e$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima. Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, namun nilai koefisiennya menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima. Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah karena nilai koefisien menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat

signifikansi adalah 0,544. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, karena nilai koefisien menunjukkan arah negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi dalam hal ini digunakan sebagai Produk Domestik Regional Bruto yang dikaitkan dengan fluktuasi harga pasar tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana naik atau turunnya harga tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan Provinsi NTT.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Muda (2017) dengan Judul Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan, yang juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dikarenakan perkembangan fisik pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan – kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya belum mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan keuangan daerah secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Di NTT.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,063. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat, belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H4 diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik, belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dimana semakin tinggi belanja modal di Provinsi NTT yang digunakan untuk belanja modal dalam pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi NTT. Pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan bahwa kinerja keuangan di Provinsi NTT dapat dikatakan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husain yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimoderasi oleh Belanja Modal

Berdasarkan pengujian hasil statistik, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,552. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima, belanja modal tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H5 ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik belanja modal tidak memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah, dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi NTT yang diperoleh dari pajak daerah maka pemerintah di Provinsi NTT tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah. untuk belanja modal dalam pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi NTT. Pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan bahwa kinerja keuangan di Provinsi NTT dapat dikatakan baik.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara langsung dikarenakan kinerja dari pegawai ukuran maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk 106 kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi. Hasil penelitian lainnya oleh Saputra (2014) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,137. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima, belanja modal tidak memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini

menunjukkan bahwa H6 ditolak.

Belanja modal otonomi daerah serta desentralisasi tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana 107 Perimbangan yang meliputi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dengan ataupun tidak adanya belanja modal dana perimbangan tetap berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sesuai dengan pemaparan pada hipotesis yang kedua

Berdasarkan hasil uji statistik, belanja modal memoderasi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, belanja modal tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah karena berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi NTT. Hal ini dapat diartikan bahwa ketiadaan belanja modal tidak mempengaruhi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Oleh Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian statistik, dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,783. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima, belanja modal tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa H7 ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik, belanja modal tidak memoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, belanja modal tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa belanja modal tidak memperkuat pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah.

Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adi (2016), Wong (2015), dan kuncoro (2019) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Dilihat dari alokasi belanja modal yang menurun setiap tahunnya, masih banyak daerah yang belum secara optimal menyediakan fasilitas umum yang memadai. Tetapi walaupun fasilitas tersebut masih minim, pertumbuhan ekonomi mengalami progres yang cukup baik dengan persentase pertumbuhan PDRB yang meningkat tahun 2006. Temuan ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah selain belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga semakin besar peningkatan PAD maka semakin besar pula kinerja keuangan daerah. Provinsi NTT. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah maka semakin baik kinerja keuangan Provinsi NTT. Sebaliknya, semakin kecil dana perimbangan yang diterima Provinsi NTT, maka semakin rendah kinerja keuangan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, sehingga naik turunnya pertumbuhan ekonomi di setiap

Provinsi NTT tidak mempengaruhi kinerja laporan keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, dan pengelolaan belanja modal yang baik menunjukkan bahwa kinerja keuangan di Provinsi NTT dapat dikatakan baik. Belanja modal tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini berarti belanja modal tidak memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi NTT. Belanja modal tidak memoderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Sehingga ada tidaknya belanja modal, dana perimbangan tetap mempengaruhi kinerja keuangan daerah Provinsi NTT. Belanja modal tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja modal tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi NTT karena pertumbuhan ekonomi sendiri tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Dari segi variabel penelitian hanya menggunakan beberapa variabel yaitu pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Diharapkan pimpinan di instansi pemerintah provinsi NTT dapat meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan dimana pimpinan siap menerima saran dan kritik yang disampaikan oleh bawahannya, mengawasi atau mengontrol tugas yang telah diberikan kepada bawahannya sehingga dapat berjalan dengan baik. selesai tepat waktu, menghargai keberhasilan pegawainya atas tugas yang telah dilaksanakan dengan memberikan penghargaan kepada pegawainya yang berprestasi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang berlaku. Diharapkan kepada pegawai pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, mematuhi kode etik di instansi tersebut, dan siap memberikan saran atau kritik kepada atasan jika diperlukan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berada di luar penelitian ini.

REFERENSI

- Abdullah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Barat, Medan*, 16–19.
- Afia, M., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2).
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Florida, A. (2016). *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE- Yogyakarta.
- Muda, I. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain – Lain Pendapatan daerah yang sah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderatin*. Universitas Sumatera Utara.
- Pemerintah Pusat. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Puspitasari, N. L. P. L., Adiputra, M. P., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–10.
- Rakhmini, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 87–88.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692. <https://www.neliti.com/id/publications/115984/pengaruh-ukuran-pemerintah-daerah-pad-leverage-dana-perimbangan-dan-ukuran-legis>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.